Klaster Wilayah Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malang

Firto Indra Raharja ^{a*}, Rina Trivinata ^b

^{ab} Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 13 Februari 2020

Revisi pertama tanggal: 11 Agustus 2020

Diterima tanggal: 24 Agustus 2020

Tersedia online tanggal: 25 Agustus 2020

ABSTRACT

Malang Regency has a diverse socio-economic conditions and environments. It is the second largest area in East Java Province. This paper aims to examine the strategy of poverty alleviation in Malang by dividing the 33 suburbs in Malang into clusters. By doing so, the government is expected to choose the best policy strategy to reduce poverty in Malang Regency. This quantitative descriptive study used the 2018 Malang Regency in Numbers. Result show that Malang Regency is divided into three different clusters and each cluster has specific programs and activities of poverty alleviation which is adjusted to the economic potential of the suburbs. The first priority of poverty resolve is cluster 2 followed by cluster 1 and cluster 3, respectively. The proposed activities in reducing poverty are not only to improve and develop the physical quality of the settlements, but also to provide skills to the poor to improve the socio-economic conditions of the community.

Keywords: poverty, policy review, cluster analysis, Malang Regency

INTISARI

Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Timur dengan keanekaragaman kondisi wilayah, sosial, dan ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti permasalahan kemiskinan di Kabupaten Malang dengan mengelompokkan 33 kecamatan menjadi klaster yang memiliki indikator kemiskinan hampir seragam untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil strategi kebijakan dalam penanganan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode analisis klaster untuk menentukan kelompok wilayah karena kemampuannya dalam memilih dan memilah secara akurat wilayah mana yang memiliki persamaan dan perbedaan karakter. Data bersumber dari Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Malang terbagi menjadi tiga klaster wilayah dimana setiap klaster memiliki program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang berbeda disesuaikan dengan potensi ekonomi wilayahnya. Penanganan kemiskinan prioritas pertama adalah klaster 2, prioritas kedua adalah klaster 1, dan prioritas 3 adalah klaster 3. Kegiatan yang diusulkan dalam penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas fisik permukiman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat pra sejahtera agar mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2020 FIA UB. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +62-813-3049-5050; e-mail: firto.raharja@gmail.com

1. Pendahuluan

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari kawasan daratan dan lautan dengan luas masing-masing 2.977,05 Km² dan 557,81 Km². Kabupaten Malang memiliki potensi yang beraneka ragam seperti pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan lain-lain. Secara administratif Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan dengan 12 Kelurahan dan 378 Desa, dimana masing-masing kecamatan mempunyai potensi dan permasalahan wilayah yang berbeda-beda.

Visi Kabupaten Malang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; yaitu terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan sebagai terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan memiliki Mental bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan. Visi tersebut diwujudkan melalui tiga strategi umum diantaranya penurunan angka kemiskinan, pengoptimalan potensi sektor pariwisata, dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Kemiskinan dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Sebagaimana amanat deklarasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki lima pondasi, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di Tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada Tahun 2015 sebesar 11,53% dan Tahun 2016 turun menjadi 11,49%. Sedangkan pada Tahun 2017 turun menjadi 11,04%. Angka kemiskinan diatas 10% dianggap masih cukup tinggi (Soesilo, Suman & Kaluge, 2008).

Langkah kebijakan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 masih bersifat umum karena ditujukan untuk seluruh wilayah kabupaten. Sementara setiap kecamatan menghadapi permasalahan kemiskinan yang berbeda serta memiliki potensi wilayah dan peluang penanganan yang berbeda pula. Pengentasan kemiskinan hendaknya diselaraskan dengan kondisi fisik, sosial serta ekonomi wilayah (Satria, 2009). Sehingga perlu arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih spesifik di setiap kecamatan.

Dengan luas wilayah yang cukup besar serta jumlah kecamatan yang cukup banyak diperlukan langkah yang

efektif dan efisien. Salah satunya dilakukan dengan mengelompokkan 33 wilayah kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan indikator kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan kemiskinan kepada masing-masing kelompok wilayah karena setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda.

2. Teori

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Sen (1999) merupakan perampasan kemampuan dasar, bukan dilihat dari pendapatan yang rendah. Perampasan kemampuan dasar itu sendiri meliputi angka kematian bayi, kekurangan gizi yang signifikan (terutama anak-anak), buta huruf, pengangguran, dan kegagalan lainnya.

Sen (1999) juga memberikan makna kemiskinan secara lebih luas, yakni ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan rendah, tak berpengetahuan, tak berketerampilan, tak berdayaan. Bahkan, Sen menyentuh dimensi politik: ketiadaan kebebasan dan keterbatasan ruang partisipasi, yang menghalangi warga untuk terlibat proses pengambilan kebijakan publik. Dalam situasi demikian, masyarakat ada dalam posisi tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif sehingga terhalang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka.

Berbeda dengan Sen, maka Nurkse dalam Mudrajad, (2000), mengemukakan bahwa negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin yang diilustrasikan dengan konsep hubungan melingkar dari sumber daya yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya sehingga menciptakan kondisi suatu negara miskin terus menerus dalam kemiskinan atau disebut sebagai teori Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Teori ini menggambarkan bahwa kemiskinan itu diibaratkan sebagai sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, akan terus berputar pada lingkaran yang sama. Berikut ilustrasi lingkaran kemiskinan yang diungkapkan oleh Nurkse.

Gambar 1 Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan Nurkse
Sumber: Mudrajad, Tahun 2000

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS Kabupaten Malang, 2018). Kemiskinan terbagi menjadi dua jenis, garis kemiskinan makanan dan non makanan. Dalam penelitian ini menggunakan indikator kemiskinan non makanan sebagai variabel meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

2.2 Analisis Klaster

Analisis klaster merupakan salah satu kelompok analisis multivariat yang mengelompokkan obyek berdasarkan karakteristik yang dimiliki (Buchori, Manullang, & Basuki, 2007). Analisis klaster dipilih karena memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah secara akurat wilayah mana yang memiliki persamaan dan perbedaan karakter. Metode pembentukan klaster yang digunakan adalah hierarki dan non hierarki. Metode hierarki melakukan pengelompokan secara bertahap sementara metode non hierarki dilakukan dengan memilih sejumlah nilai klaster yang diinginkan kemudian obyek digabungkan dalam klaster-klaster tersebut. Penelitian ini menggunakan dua model yang bertujuan untuk membandingkan apakah klaster yang terbentuk sama atau tidak sehingga bisa dianggap valid.

2.3 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dilakukan dengan menelaah kebijakan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam usahanya menangani kemiskinan salah satunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Menurunkan angka kemiskinan merupakan target utama Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang sejahtera dan berdaya saing.

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu upaya perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Malang melalui misi kelima, yaitu melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa. Misi tersebut bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,44% sampai 9,04% melalui pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menunjang prioritas kebijakan penurunan jumlah kemiskinan, beberapa sasaran diukur dengan capaian target yang sesuai. Prioritas kebijakan kemiskinan ini

juga akan berimbas pada anggaran, baik APBD kabupaten maupun Dana Desa, yang terprioritaskan dalam ranah penanggulangan jumlah kemiskinan (Putra, 2013). Penanganan masalah kemiskinan termasuk dalam Prioritas II dalam kebijakan alokasi anggaran, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.

Pemerintah menyusun langkah- langkah dalam upaya penurunan angka kemiskinan tersebut melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan poin-poin kebijakan umum, antara lain sebagai berikut:

- a) Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
- b) Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
- c) Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
- d) Pengentasan kemiskinan melalui koperasi; dan
- e) Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan pembukaan sentra industri kreatif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Tahapan analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan klaster wilayah tingkat kecamatan menggunakan metode analisis klaster dengan bantuan program statistik SPSS. Berdasarkan kajian pustaka, peneliti mengambil indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang sekaligus sebagai variabel yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

- a) Jumlah keluarga pra sejahtera (X1);
- b) Jumlah rumah tidak layak huni (X2);
- c) Jumlah kasus penyakit diare (X3);
- d) Jumlah pekerja buruh tani (X4); dan
- e) Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (X5).

Hasil analisis klaster berupa pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan karakteristiknya, dikaji lebih lanjut menggunakan pendekatan kebijakan publik serta disesuaikan dengan kondisi potensi sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga menghasilkan strategi dan program kebijakan yang sesuai untuk menanggulangi kemiskinan di klaster wilayah tersebut.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji Data Statistik

Sebelum data diolah menggunakan analisis kluster, perlu diuji terlebih dahulu apakah data yang dimiliki terdistribusi normal atau tidak menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah RTLH	Jumlah Kasus Penyakit Diare	Jumlah Pekerja Buruh Tani	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi
N	33	33	33	33	33
Normal Parameters ^{a,b}					
Mean	3743.42	533.55	2227.81	10671.67	152.30
Std. Deviation	1430.276	300.608	1125.123	5672.781	53.635
Most Extreme Differences					
Absolute	.138	.176	.173	.146	.143
Positive	.138	.176	.173	.146	.143
Negative	-.065	-.134	-.106	-.117	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z	.792	1.014	.994	.837	.819
Asymp. Sig. (2-tailed)	.557	.256	.277	.486	.513

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Gambar 2 Hasil Uji K-S

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Menurut Buchori et al., (2007), kriteria pengujian, yaitu sebagai berikut:

- Angka Signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data terdistribusi normal; dan
- Angka Signifikansi (Sig.) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal.

4.2 Analisis Kluster Hierarki

Metode pertama yang digunakan adalah analisis kluster hierarki Ward's Methode karena jumlah variabel yang diteliti relatif sedikit. Jenis pengelompokan yang dipilih adalah aglomerasi, yaitu mencari kesamaan obyek yang terdekat dan menjadikannya satu kelompok dan seterusnya hingga menjadi beberapa kelompok sampai akhirnya seluruh obyek menjadi satu kluster besar (Buchori et al., 2007). Metode Ward menghitung dengan mengukur jarak kuadrat Euclidean antar obyek. Keluaran analisis kluster metode Ward dapat dilihat berikut:

Tabel 1 Cluster Membership

No.	Case	4 Clusters	3 Clusters	2 Clusters
1	Donomulyo	1	1	1
2	Kalipare	2	1	1
3	Pagak	2	1	1
4	Bantur	1	1	1
5	Gedangan	2	1	1
6	Sumbermanjing	2	1	1
7	Dampit	3	2	2
8	Tirtoyudo	2	1	1
9	Ampelgading	2	1	1
10	Poncokusumo	4	3	1
11	Wajak	1	1	1
12	Turen	3	2	2
13	Bululawang	1	1	1

No.	Case	4 Clusters	3 Clusters	2 Clusters
14	Gondanglegi	3	2	2
15	Pagelaran	1	1	1
16	Kepanjen	2	1	1
17	Sumberpucung	2	1	1
18	Kromengan	2	1	1
19	Ngajum	2	1	1
20	Wonosari	2	1	1
21	Wagir	1	1	1
22	Pakisaji	2	1	1
23	Tajinan	1	1	1
24	Tumpang	4	3	1
25	Pakis	3	2	2
26	Jabung	2	1	1
27	Lawang	2	1	1
28	Singosari	3	2	2
29	Karangploso	2	1	1
30	Dau	2	1	1
31	Pujon	4	3	1
32	Ngantang	4	3	1
33	Kasembon	4	3	1

Sumber: Hasil analisis, 2019

Hasil klusterisasi Metode Ward dapat disimpulkan bahwa kluster 1 terdiri dari 23 kecamatan, kluster 2 terdiri dari lima kecamatan dan kluster 3 terdiri dari lima kecamatan. Seperti yang tercantum pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Hasil Pengelompokan Kecamatan Menggunakan Ward's Method

No	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
1	Donomulyo	Dampit	Poncokusumo
2	Kalipare	Turen	Tumpang
3	Pagak	Gondanglegi	Pujon
4	Bantur	Pakis	Ngantang
5	Gedangan	Singosari	Kasembon
6	Sumbermanjing		
7	Tirtoyudo		
8	Ampelgading		
9	Wajak		
10	Bululawang		
11	Pagelaran		
12	Kepanjen		
13	Sumberpucung		
14	Kromengan		
15	Ngajum		
16	Wonosari		
17	Wagir		
18	Pakisaji		
19	Tajinan		
20	Jabung		
21	Lawang		
22	Karangploso		

No	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
23	Dau		

Sumber: Hasil analisis, 2019

4.3 Analisis Klaster Non Hierarki

Metode analisis klaster yang kedua adalah analisis klaster non hierarki menggunakan pendekatan K-means. Metode K-Means memproses semua objek secara sekaligus dimana k merupakan banyaknya kelompok (Putriana, Setyawan, & Noeryanti, 2016). Pada metode sebelumnya dilakukan pengelompokan dengan jumlah klaster yang terbentuk yaitu tiga, hal yang sama diberlakukan menggunakan metode ini.

Keluaran metode non hierarki berupa tabel ANOVA yang menunjukkan nilai Signifikansi (Sig.) untuk semua variabel hampir mendekati angka nol. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel memiliki perbedaan yang signifikan dengan level signifikansi sebesar nilai F.

Semakin besar nilai F semakin tinggi tingkat signifikansi-nya (Simamora, 2017). Hasil akhir analisis klaster non hierarki metode K-means membentuk tiga kelompok, dengan anggota klaster 1 sebanyak 12 wilayah, klaster 2 sebanyak enam wilayah dan klaster 3 sebanyak 15 wilayah. Keluaran klaster dengan metode K-means ternyata sangat berbeda dengan keluaran klaster pada metode hierarki. Hasil pengelompokan kecamatan ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Pengelompokan Kecamatan Menggunakan K-means

No	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
1	Donomulyo	Poncokusumo	Kalipare
2	Bantur	Kepanjen	Pagak
3	Sumbermanjing	Tumpang	Gedangan
4	Dampit	Jabung	Tirtoyudo
5	Wajak	Pujon	Ampelgading
6	Turen	Ngantang	Pagelaran
7	Bululawang		Sumberpucung
8	Gondanglegi		Kromengan
9	Wagir		Ngajum
10	Tajinan		Wonosari
11	Pakis		Pakisaji
12	Singosari		Lawang
13			Karangploso
14			Dau
15			Kasembon

Sumber: Hasil analisis, 2019

4.4 Perbandingan Hasil Klaster

Setelah dilakukan analisis menggunakan dua macam metode, ditemukan hasil klaster yang berbeda. Untuk mengetahui hasil klaster yang paling optimum,

diperlukan uji validitas kelompok untuk mengevaluasi hasil dari analisis kelompok secara kuantitatif sehingga dihasilkan kelompok optimum. Kelompok optimum adalah kelompok yang mempunyai jarak yang padat antar individu dalam kelompok dan terisolasi dari kelompok lain dengan baik (Rahmawati, Abadyo, & Lestari, 2013).

Menurut Sharma (1996) dalam Rahmawati et al., (2013), indeks yang bisa dijadikan tolok ukur dalam pengujian validitas kelompok adalah indeks RMSSTD (*Root Mean Square Standart Deviation*). RMSSTD atau rasio standar deviasi mengukur kehomogenan dari kelompok yang terbentuk pada setiap tahap. Semakin kecil nilai RMSSTD semakin tinggi nilai kehomogenan kelompok yang terbentuk pada tahap tersebut. Nilai RMSSTD yang besar menunjukkan klaster yang terbentuk tidak homogen.

Berikut hasil penghitungan rasio standar deviasi dari dua macam klaster yang terbentuk (Tabel 4):

Tabel 4 Nilai Rasio Standar Deviasi Tiap Klaster

	Ward's	K-Means
Rata-rata variabel klaster 1	3339,452	3254,35
Rata-rata variabel klaster 2	3574,64	4446,2
Rata-rata variabel klaster 3	3937,96	3242,733
Standar Deviasi klaster 1	1171,518	734,0002
Standar Deviasi klaster 2	886,5311	1376,684
Standar Deviasi klaster 3	1778,073	1338,238
Standar Deviasi Dalam Klaster	1278,707	1149,641
Simpangan Baku Antar Klaster	301,5312	691,4928
Rasio	4,240713	1,662549

Keterangan

Rata-rata Tinggi
Rata-rata Sedang
Rata-rata Rendah

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari dua metode analisis klaster hierarki dan non hierarki diketahui bahwa klaster optimum dengan nilai rasio terkecil terdapat pada metode K-means dengan nilai rasio sebesar 1,6625. Hal ini dijadikan dasar peneliti untuk memilih klaster hasil metode K-means sebagai klaster yang paling sesuai dan dapat diaplikasikan.

4.5 Profil Hasil Klaster

Profiling atau membuat profil hasil klaster adalah melakukan interpretasi hasil klaster yang telah terpilih dan mengkaitkannya dengan tujuan penelitian, yaitu menentukan strategi kebijakan penanganan kemiskinan yang sesuai dengan karakter atau profil masing-masing kelompok wilayah. Hal ini dapat dilakukan dengan

mengamati dan menghitung nilai rerata masing-masing variabel tiap kelompok menggunakan data dasar. Nilai rata-rata dari masing-masing variabel di tiap kelompok akan menunjukkan kelompok mana yang nilai rata-ratanya tinggi atau rendah dari kelompok lain. Nilai rata-rata tinggi berarti variabel itu dominan dalam kelompok tersebut sehingga menentukan arah kebijakan yang sesuai untuk penanganannya. Profil hasil klaster dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Profil Hasil Klaster Terpilih

Variabel	Klaster		
	1	2	3
X1	4.277	4.999	2.814
X2	448	884	462
X3	3.387	1.508	1.589
X4	7.971	14.654	11.240
X5	189	187	109
Permasalahan	Fisik Lingkungan	Sosial Ekonomi dan Fisik Lingkungan	Sosial Ekonomi
Potensi berdasarkan Karakteristik Wilayah	Perikanan darat dan laut, industri kreatif, pariwisata bahari	Pertanian dan perkebunan, industri UMKM, pariwisata alam	Peternakan, pariwisata buatan

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Sebagian besar anggota klaster 1 terdiri dari kecamatan dengan jumlah kasus penyakit diare yang tinggi. Sehingga pada klaster 1 menunjukkan bahwa kondisi fisik lingkungan permukiman belum memenuhi standar sanitasi yang baik. Sementara pada klaster 2 memiliki indikator dengan jumlah keluarga pra sejahtera, jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah buruh tani yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa selain kondisi fisik lingkungan hunian yang kurang layak, kemampuan sosial dan ekonomi masyarakatnya juga masih dibawah rata-rata. Sedangkan klaster 3 merupakan kumpulan kecamatan yang memiliki indikator dengan jumlah rumah tidak layak huni, jumlah kasus penyakit diare dan jumlah buruh tani yang termasuk dalam taraf menengah.

4.6 Analisis Kebijakan

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu upaya perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. Misi tersebut bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,44% sampai 9,04% melalui upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Beberapa sasaran diukur dengan capaian target yang telah disusun untuk menunjang prioritas kebijakan penurunan jumlah kemiskinan.

Berdasarkan profiling hasil ketiga klaster teridentifikasi dua masalah utama, yaitu kondisi fisik lingkungan yang kurang memadai dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran di Kabupaten Malang, penanganan kemiskinan termasuk dalam Prioritas II yang dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.

Berikut pada tabel 6 dan tabel 7 merupakan strategi, kebijakan, dan program di Kabupaten Malang yang mendukung penanganan kemiskinan sesuai dengan permasalahan dan potensi dari masing-masing klaster wilayah.

Tabel 6 Strategi, Kebijakan,

dan Program Pembangunan Fisik Lingkungan

Sektor	Analisis
Permukiman dan Lingkungan	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 1 dan 2.
Strategi	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan.
Kebijakan	Mengimplementasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
Program	a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman; b. Program Pengelolaan Perumahan; c. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik; d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); e. Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan.
Kesehatan	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 1 dan 2.
Strategi	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar.
Kebijakan	Mengimplementasikan dan menformulasikan

Sektor	Analisis
Program	kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat.
	a. Program Sumber Daya Kesehatan;
	b. Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
	c. Program Peningkatan kesehatan masyarakat;
	d. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
	e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

Tabel 7 Strategi, Kebijakan dan Program Berdasarkan Potensi Wilayah

Sektor	Analisis
Pertanian dan Perkebunan	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 2.
Strategi	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan.
Kebijakan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan.
Program	a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
	b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura;
	c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan;
	d. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
	e. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;
	f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
Peternakan	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 3.
Strategi	a. Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan;
	b. Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan;
	c. Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan;
	d. Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan.
Kebijakan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi hasil ternak.
Program	a. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
	b. Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan;
	c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

Sektor	Analisis
	d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
Pariwisata	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 1.
Strategi	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.
Kebijakan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu).
Program	a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
	b. Program Pengembangan Kemitraan;
	c. Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya.
Industri UMKM	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 2.
Strategi	a. Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;
	b. Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri.
Kebijakan	a. Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah;
	b. Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM
Program	a. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
	b. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
	c. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
	d. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
	e. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
	f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.
Usaha Industri Kreatif	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 1.
Strategi	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif local.
Kebijakan	Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif.
Program	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro;
	b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro;
	c. Program Pembinaan Industri;
	d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
	e. Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
	f. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan.

Sektor	Analisis
Perikanan	Strategi kebijakan dan program ini difokuskan untuk penanganan kemiskinan pada klaster 1.
Strategi	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
Kebijakan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
Program	a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; b. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil; c. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; d. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

4.7 Usulan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan strategi, kebijakan, dan program diatas, peneliti menyusun usulan kegiatan prioritas baru yang belum terprogram dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Usulan kegiatan ini tidak hanya dilakukan melalui pembangunan untuk peningkatan kualitas fisik permukiman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat pra sejahtera agar mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan agar mereka bisa hidup mandiri tanpa mengharap campur tangan dari pemerintah (Ningsih, 2011). Peneliti membaginya menjadi tiga sesuai dengan jumlah klaster wilayah.

Prioritas penanganan kemiskinan pertama adalah klaster 2 yang berfokus pada dua hal, yaitu peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas fisik lingkungan permukiman. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi wilayah klaster 2 berupa sektor pertanian dan perkebunan, industri UMKM dan wisata alam. Prioritas kedua adalah perbaikan kondisi fisik lingkungan permukiman pada wilayah klaster 1 yang didukung oleh potensi wilayah pada sektor perikanan darat dan laut, industri kreatif dan pariwisata bahari. Sementara penanganan kemiskinan prioritas ketiga adalah wilayah klaster 3 yang berfokus pada penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kekuatan pada sektor industri peternakan dan pariwisata buatan. Pemetaan strategi kebijakan, program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Usulan Kegiatan Prioritas

Prioritas	I
Wilayah	Klaster 2
Potensi Wilayah	- Potensi pertanian dan perkebunan; - Ibukota kabupaten sebagai pusat industri UMKM; - Potensi wisata alam pegunungan.

Arah Penanganan	Kombinasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas fisik lingkungan permukiman.
Usulan Kegiatan	1. Peningkatan kapasitas petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam mengolah produk mentah; 2. Bantuan modal usaha berupa pinjaman lunak dan alat produksi olahan hasil pertanian; 3. Peningkatan kapasitas keterampilan/ <i>start up</i> usaha kreatif untuk usia remaja dan dewasa muda yang mendukung pengembangan desa wisata; 4. Peningkatan kualitas/ pembangunan baru rumah tidak layak huni khususnya di wilayah perkotaan ibukota kabupaten dan sekitar obyek wisata alam.

Prioritas	II
Wilayah	Klaster 1
Potensi Wilayah	- Potensi perikanan darat dan laut; - Sentra industri kreatif; - Potensi wisata alam bahari.
Arah Penanganan	Peningkatan kualitas fisik lingkungan permukiman.
Usulan Kegiatan	1. Peningkatan kualitas/ pembangunan baru rumah tidak layak huni, MCK dan bio septic tank komunal, sistem drainase, serta sumur resapan di wilayah pesisir sekitar pelabuhan Sendang Biru; 2. Pengembangan pelabuhan perikanan Sendang Biru yang mendukung aktivitas utama sebagai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan dikombinasikan dengan pelabuhan wisata;

Prioritas	III
Wilayah	Klaster 3
Potensi wilayah	- Potensi peternakan unggas, kambing dan sapi perah; - Potensi wisata buatan dan modern.
Arah Penanganan	Peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Usulan Kegiatan	1. Mendukung pemasaran produk hasil UMKM lokal di tempat-tempat strategis seperti obyek wisata Wendit, Rest Area Karangploso, dan Rest Area Jalan Tol Malang-Pandaan. 2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha bagi wanita/ ibu rumah tangga seperti pelatihan pengolahan produk peternakan seperti telur asin dengan variasi rasa, susu sapi dan kambing yang

- diolah menjadi keripik, stick, permen dan lainnya;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan desa wisata dan pekerja sektor pariwisata;
 4. Bantuan modal usaha berupa pinjaman lunak dan alat produksi usaha mikro dan kecil.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2019

5. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang penanganannya masih menjadi perhatian seluruh negara di dunia melalui SDG's, tak terkecuali di Indonesia. Selama ini penanganan kemiskinan di daerah atau kabupaten belum dilakukan secara komprehensif. Jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas serta anggaran daerah yang terbatas menjadi kendala bagi sebagian besar pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan. Kabupaten Malang sebagai salah satu provinsi terluas di Jawa Timur, telah memiliki program pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Namun kebijakan ini diberlakukan sama rata pada setiap kecamatan yang sebetulnya memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Sehingga diperlukan pengelompokan wilayah kecamatan yang memiliki kondisi dan karakter kemiskinan serupa untuk memudahkan penerapan program penanganan kemiskinan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi serta memberdayakan potensi wilayah yang dimiliki setiap kelompok wilayah.

Berdasarkan hasil analisis kluster diketahui terdapat tiga kelompok (kluster) kecamatan yang memiliki permasalahan kemiskinan antara lain kluster 1 yang cenderung memiliki permasalahan kemiskinan karena buruknya kondisi fisik lingkungan hunian; kluster 2 merupakan kelompok kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi karena kondisi fisik lingkungan dan sosial ekonomi yang buruk; serta kluster 3 merupakan kelompok kecamatan yang lebih mengarah kepada kondisi sosial ekonomi yang rendah. Dari hasil pengklasteran tersebut, kluster 2 merupakan prioritas utama untuk ditangani melalui usulan kegiatan berupa peningkatan kapasitas petani tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dalam mengolah produk mentah serta peningkatan kualitas/ pembangunan baru rumah tidak layak huni khususnya di wilayah perkotaan. Prioritas kedua adalah kluster 1 dengan fokus penanganan berupa perbaikan dan pengembangan sarana prasarana permukiman serta pengembangan Pelabuhan Perikanan Sendang Biru yang mendukung aktivitas utama sebagai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan dikombinasikan dengan pelabuhan wisata. Prioritas ketiga adalah kluster 3 dengan kegiatan penanganan yang diusulkan berupa pemasaran produk hasil UMKM lokal

di tempat-tempat strategis seperti obyek wisata serta Peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha bagi wanita/ ibu rumah tangga seperti pelatihan pengolahan produk peternakan.

Daftar Pustaka

- Buchori, I., Manullang, O. R., & Basuki, Y. (2007). *Buku Ajar Metode Analisis Perencanaan*. [Tersedia pada Universitas Diponegoro.]
- BPS Kabupaten Malang. (2018). *Kabupaten Malang Dalam Angka (2018th ed.)*. Malang: Badan Pusat Statistik.
- Mudrajad, Kuncoro. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Ningsih, Mega Puspita. (2011). Analisis Dampak Bantuan Program Penganggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212.
- Putriana, U., Setyawan, Y., & Noeryanti. (2016). Metode Cluster Analysis Untuk Pengelompokan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Variabel Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Tahun 2013. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 1(1), 38–52.
- Rahmawati, L., Abadyo, & Lestari, T. E. (2013). Analisis Kelompok Dengan Menggunakan Metode Hierarki Untuk Pengelompokan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasar Indikator Kesehatan. *Skripsi*, Program Studi Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Satria, Dias. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 37-47.
- Sen, Amartya. (1999). *Development As Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Simamora, Bilson. (2017). *Analisis Cluster*. Diakses pada tanggal 13 Desember 2019, dari <https://www.bilsonsiamamora.com/multivariat/cluster-analysis/>
- Soesilo, Y. H., Suman, A., & Kaluge, D. (2008). Penyebab Kemiskinan Masyarakat Tani (Studi di Dusun Ngebrong, Desa Tawangsari, Kecamatan

Pujon, Kabupaten Malang). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(1), 57-67.